

**NGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, LEVERAGE, JUMLAH
PENDUDUK, DAN UMUR PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota
Di Provinsi Jawa Tengah)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh :
Andre Dewatara Dwi Putra
18.0102.0083

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITA MUHAMMAADIYAH MAGELANG
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia mempunyai banyak wilayah. Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur perekonomiannya sesuai dengan prinsip desentralisasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Pasal 1 ayat (8) UU No 23/2014, Otonomi Daerah mencakup hak, kewenangan, serta kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah lokal yang mempunyai hak otonomi dapat dengan leluasa mengatur daerahnya untuk meningkatkan kemakmuran penduduk dengan meningkatkan pelayanan publik, pembinaan keterlibatan penduduk, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan daya saing dengan berfokus pada spesialisasi atau peluang unik yang ada di daerah tersebut.

Menurut UU No 23/2014, pemerintah lokal berwenang mengelola sumber daya keuangan daerah, dengan landasan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai pengetahuan yang lebih unggul mengenai keunggulan daerah, kebutuhan masyarakat, serta manfaatnya dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. Pendapatan yang dihasilkan dari inisiatif pemerintah

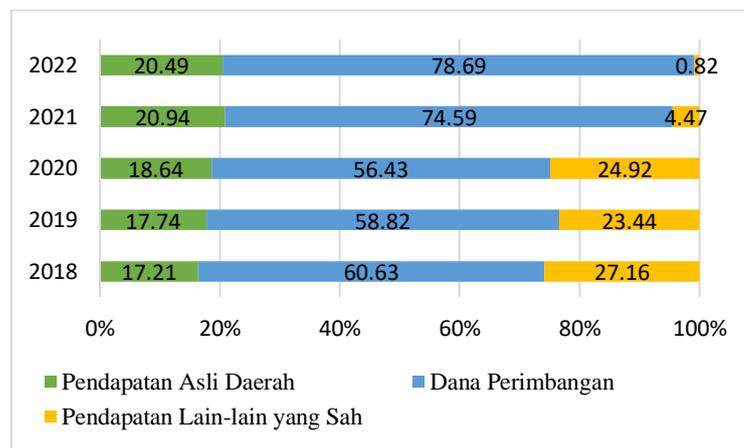
daerah disebut sebagai pendapatan lokal. Hak otonom diharapkan untuk membantu pendapatan lokal dan peningkatan akuntabilitas pemerintah lokal, sehingga memfasilitasi pencapaian tujuan desentralisasi.

Putri & Yuniarta, (2023) menegaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan efektivitas hasil operasional sektor keuangan daerah mengenai pengelolaan pendapatan dan belanja, berpedoman pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam periode tertentu, dengan tujuan mencapai kinerja optimal sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Alfi & Sari (2023) menegaskan kinerja pemerintah lokal sebagai pencapaian hasil keuangan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan yang efektif serta sesuai dengan peraturan tentu akan meningkatkan kinerja pemerintah lokal.

Pendapatan Asli Daerah (Pendapatan lokal) adalah pendapatan yang dihasilkan sesuai dengan norma setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membiayai pembangunan daerah atau kebutuhan lainnya. Menurut Padang & Padang (2023) pendapatan lokal awal tumpuan pembiayaan daerah. Untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan, pemerintah daerah harus mengenali potensi yang dimilikinya dan mengidentifikasi sumber daya yang tersedia. Besarnya pendapatan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai dana untuk membiayai program-program pembangunan yang direncanakan, sehingga menghasilkan kinerja keuangan yang patut diapresiasi.

Namun fakta dilapangan mengatakan bahwa tingkat ketergantungan dana perimbangan masih tinggi. Tahun 2021 Dana Perimbangan dari 35 daerah

di Provinsi Jawa Tengah telah meningkat pesat dibanding tahun sebelumnya. Pendapatan dana perimbangan tiap daerah melampui diatas 50 persen yang memiliki rata-rata sebesar 74,59 persen (BPS.go.id 2021, data diolah kembali)



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Gambar 1. 1
Realisasi Pendapatan Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah 2018-2022

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir pada periode 2018-2022 penerimaan dari dana perimbangan merupakan sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang tertinggi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Meskipun pada tahun 2019-2020 sempat terjadi penurunan, namun pada tahun berikutnya terjadi peningkatan penerimaan dana perimbangan. Persentase penerimaan dana perimbangan yang paling tinggi diperoleh pada tahun 2022 dengan persentase 78,69% dari total pendapatan daerah, dimana jumlah tersebut bahkan meningkat melampaui realisasi pendapatan daerah tahun 2021 sebesar 4,1%.

Novita & Arza (2024) menegaskan bahwa dana perimbangan merupakan contoh konsep keseimbangan antara pusat dan daerah. Tujuan dana transfer diberikan agar daerah tertentu tidak tertinggal dari daerah lain dalam pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan perolehan aset yang diperlukan melalui pengalokasian penerimaan dana. Dana perimbangan berfungsi sebagai sumber dana kegiatan pemerintah lokal. Besarnya dana transfer melebihi pendapatan lokal memperlihatkan tingkat ketergantungan pemerintah lokal terhadap pusat untuk memenuhi kebutuhan, menyebabkan penurunan kinerja keuangan pemerintah lokal.

Belanja modal adalah kegiatan membeli aset atau investasi yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran (Mahadewi & Indraswarawati, 2023). Dengan mengalokasikan pendapatan daerah pada belanja modal, pemerintah lokal bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Realisasi belanja modal pada 35 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 rata-rata sebesar 12,25, sedangkan untuk belanja pegawai sebesar 40,11 (BPS.go.id 2021, data diolah kembali). Dana yang diterima pemerintah lokal sebagian besar dialokasikan pada belanja pegawai, padahal dana tersebut ditujukan untuk kesejahteraan daerah. Perencanaan belanja modal yang tidak memadai mengakibatkan prioritas proyek tidak konsisten sehingga mengakibatkan dana terbuang sia-sia dan hasil yang tidak memuaskan. Belanja modal yang baik akan memberikan manfaat yang besar bagi daerah, sehingga penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah lokal akan baik. Alokasi pada belanja modal

berdampak terhadap kinerja keuangan pemerintah lokal. Dengan melimpahnya modal yang tersedia, pemerintah lokal dapat melaksanakan berbagai macam proyek yang nantinya akan bermanfaat.

Sesuai Pasal 1 ayat (38) UU No 23/2014, Pemerintah lokal dapat memanfaatkan pinjaman pihak luar, seperti bank umum, investor swasta, dan lembaga keuangan lainnya, dalam pelaksanaan rencana kerja. Pinjaman ini dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur atau meningkatkan layanan publik. Meningkatnya utang pemerintah daerah mengakibatkan pengawasan yang lebih ketat oleh kreditor untuk menjamin pembayaran kembali uang yang dipinjamkan. Pemerintah daerah dengan tingkat utang yang tinggi diperkirakan akan menunjukkan risiko yang signifikan dan kinerja keuangan di bawah standar karena ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal (Natoen et al., 2019).

Natoen et al (2019) menegaskan jumlah masyarakat mempengaruhi performa pemerintah lokal, karena jumlah masyarakat besar dapat meningkatkan pendapatan pemerintah lokal. Salah satu daerah yang memiliki jumlah masyarakat terpadat di Indonesia adalah Jawa Tengah. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah masyarakat Jawa Tengah tahun 2023 adalah 37.540.962 orang. Jumlah masyarakat yang besar tentunya akan mempengaruhi perekonomian daerah. Peningkatan jumlah angkatan kerja akan meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, sehingga meningkatkan kinerja keuangannya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya penduduk yang membayar pajak daerah.

Lamanya suatu pemerintah lokal beroperasi salah satu kriteria menentukan seberapa baik kinerja pemerintah lokal secara finansial. Penentuan umur suatu pemerintahan daerah dapat dilakukan dengan menentukan jangka waktu yang telah berlalu sejak berdirinya pemerintahan daerah tersebut (Natoen et al., 2019). Pemerintahan lokal yang sudah lama berdiri akan mempunyai pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara mengelola potensi daerah secara efektif. Dampaknya, kinerja keuangan pemerintah lokal juga akan meningkat.

Penelitian ini berdasarkan penelitian Putri & Yuniarta, (2023) berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021. Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan **pertama** penelitian ini adalah penambahan variabel *leverage*, jumlah Penduduk, dan umur pemerintah daerah sebagai variabel independen. Variabel tersebut mengacu pada penelitian yang dilakukan Alfi & Sari (2023). Alasan variabel ini ditambahkan adalah karena variabel-variabel tersebut dianggap relevan dan signifikan dalam mempengaruhi kinerja keuangan. Selain itu, penambahan variabel ini bertujuan menguji hasil yang diperoleh serupa atau berbeda.

Perbedaan **kedua** yaitu mengambil sampel yang diambil dari laporan realisasi anggaran (LRA) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada penerimaan dana perimbangan makin besar dalam 5 tahun terakhir. Hal ini menjadi penting untuk dianalisis, karena

dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja pemda?
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja pemda?
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja pemda?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap kinerja pemda?
5. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap kinerja pemda?
6. Apakah umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemda?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji serta menganalisa pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan.
2. Menguji serta menganalisa pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan.
3. Menguji serta menganalisa pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan.
4. Menguji serta menganalisa pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan.
5. Menguji serta menganalisa pengaruh jumlah penduduk terhadap kinerja keuangan
6. Menguji serta menganalisa pengaruh umur pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah kepada para pembaca mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, *leverage*, jumlah penduduk, dan umur pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dibidang akuntansi terutama yang berkaitan dengan pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, *leverage*, jumlah penduduk, dan umur pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2. Kontribusi Praktis

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan umum bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja keuangan melalui analisa faktor-faktor internal maupun eksternal dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan riset, kontribusi penelitian dan sistematika riset.

BAB II TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini menjabarkan mengenai telaah teori, penelitian terdahulu, perumusan hipotesis, dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menggambarkan mengenai objek dan sampel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik analisis data, serta pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai hasil dan pembahasan permasalahan melalui uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji auto korelasi serta pengujian hipotesis yang meliputi uji analisis regresi berganda, koefisien determinasi, uji F dan uji t.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

BAB II

TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis

1. Telaah Teori

a) *Signaling Theory*

Menurut Ross (1977) pihak pemberi informasi akan mengirimkan dua jenis informasi: satu dengan sinyal positif dan yang lainnya dengan sinyal negatif. Informasi diberikan untuk menilai prospek yang menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi pihak-pihak yang memerlukannya dalam situasi di masa depan. Menurut Padang & Padang (2023) menegaskan bahwa teori sinyal dirumuskan supaya mengatasi asimetri informasi dalam organisasi dengan cara menaikkan transmisi sinyal dari pihak pemberi informasi kepada pemangku kepentingan dengan informasi yang lebih sedikit. Asimetri informasi timbul dari adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh salah satu pihak dalam suatu transaksi.

Untuk mendapatkan keuntungan tertentu dibandingkan pihak lain yang kekurangan informasi, pihak yang mempunyai pengetahuan unggul memanfaatkan keadaan. Teori sinyal di sektor publik menjelaskan mengapa pemerintah daerah menggunakan laporan keuangan untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan kota-kota tetangga. Laporan keuangan dari pemerintah daerah memberikan indikasi pelaporan dan keterbukaan dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas pekerjaan yang dilakukan. Dalam penelitian ini pemerintah daerah memberikan sinyal tentang kinerja keuangan pemerintah daerah selama periode tahun anggaran yang bersangkutan dengan cara mempublikasikan laporan keuangan pemerintah daerah yang dirilis tiap tahun.

b) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Penilaian kinerja sektor publik dibuat untuk memudahkan manajer publik dalam menganalisa efektivitas strategi dengan menggunakan tolok ukur, yang mencakup kinerja keuangan dan non-keuangan (Priyono et al., 2021). Fahmi (2012) mendefinisikan kinerja keuangan sebagai output yang diperoleh dari suatu organisasi mematuhi peraturan pelaksanaan keuangan secara efektif dan akurat. Jika dana yang dikelola tidak dibarengi dengan keterampilan manajerial yang efektif dan pengawasan yang ketat, kemungkinan terjadinya penipuan yang signifikan akan meningkat (Bagus Fahreza et al., 2022). Untuk memitigasi hal ini, pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap pemerintah daerah melalui laporan keuangan yang dipublikasikan setiap tahunnya. Jika ada bukti penipuan, akan dilakukan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah..

Ayu & Yuniarta (2023) menegaskan untuk mengukur pemerintah lokal dilakukan melalui penerapan rasio keuangan terhadap APBD. Rasio-rasio tersebut meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio derajat desentralisasi fiskal, dan rasio pertumbuhan. Derajat desentralisasi fiskal ditentukan dengan mengurangkan total

pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dengan pendapatan awal daerah.. Mahmudi (2016) menyatakan bahwa pemerintah daerah yang rasionya di atas 50% dianggap mandiri, sedangkan pemerintah daerah yang rasionya di bawah 50% dianggap sangat bergantung pada dana perimbangan yang dialokasikan.

c) Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No 23/2014 pendapatan lokal adalah pendapatan yang diperoleh sesuai dengan peraturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Halim (2012) mendefinisikan pendapatan lokal adalah pendapatan dari suatu daerah bersumber dalam wilayah hukumnya.

Bisa dikatakan pendapatan lokal berasal dari potensi suatu daerah diperoleh dengan peraturan yang berlaku. Pendapatan lokal ini selanjutnya akan menunjang sumber pendanaan operasional pemerintah lokal.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26, kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

1. Pajak Daerah pungutan yang diraiik oleh pemerintah lokal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah tersebut dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pajak daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea

balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

2. Retribusi Daerah adalah pembayaran yang dikenakan atas jasa atau izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang individu atau badan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah penghasilan berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas bagian keuntungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bagian keuntungan Lembaga Keuangan Bank, bagian keuntungan Lembaga Keuangan Bukan Bank, serta bagian keuntungan penyertaan modal atau penyertaan kepada pihak ketiga.
4. PAD Lainnya Yang Sah adalah Pendapatan lain-lain yang diterima pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam klasifikasi PAD dan Pendapatan Transfer. Pendapatan lain yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lain-lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

d) Dana Perimbangan

Dana transfer berasal dari APBN diperuntukkan untuk membiayai kegiatan pemerintah lokal (Badjra et al., 2017). Dana transfer digunakan memitigasi kesenjangan regional, memastikan bahwa daerah-daerah yang

kurang berkembang tidak tertinggal jauh dari daerah-daerah yang lebih makmur.

Potensi pendapatan bervariasi berdasarkan geografi; beberapa mempunyai potensi pendapatan yang besar sementara yang lain memiliki potensi pendapatan yang sangat buruk. Oleh karena itu, untuk mencapai keseimbangan, pusat berhak mengalokasikan dana transfer ke setiap daerah di Indonesia. Sesuai Pasal 1 UU No23/2014, Dana transfer yang terdiri atas DAU, DAK, dan DBH, bersumber dari pendapatan APBN. Dana transfer ini selanjutnya akan menjadi sumber keuangan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi tanggung jawabnya.

e) Belanja Modal.

Menurut Putri dan Yuniarta (2023), belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah lokal dengan tujuan untuk membeli aset atau menghasilkan keuntungan bagi daerah. Segala kewajiban daerah yang dicatat sebagai penurunan nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan dianggap sebagai belanja daerah, sesuai UU No 23/2014 tentang pemerintah lokal.

Penjataan anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lain yang menghasilkan keuntungan selama beberapa periode akuntansi disebut belanja modal. Pembelian tanah, bangunan, struktur, mesin, aset tidak berwujud, dan pengeluaran lebih lanjut yang meningkatkan nilai aset tersebut semuanya dianggap sebagai belanja modal. Menurut Novita & Azra (2024), dalam penggunaan APBD realisasi belanja modal sering kali

tidak mencapai target yang direncanakan sebelum akhir tahun anggaran, namun belanja pegawai seringkali melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan APBD oleh pemerintah lokal tidak lagi terfokus pada belanja modal.

f) *Leverage*

Leverage atau liabilitas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah lokal. Sektor swasta adalah tempat dimana istilah "*leverage*" paling sering digunakan. *Leverage* menampilkan utang perusahaan. *Leverage* merupakan statistik yang mengevaluasi ketergantungan suatu daerah terhadap kreditur untuk pembiayaan asset (Sari, 2016).

Daerah dengan tingkat *leverage* yang tinggi lebih bergantung pada pinjaman dari sumber luar untuk membiayai asetnya. Pemerintah daerah mungkin memiliki terlalu banyak utang dan harus berupaya menguranginya jika rasio *leverage* sangat tinggi. Oleh karena itu, semakin banyak utang yang dimiliki suatu pemerintah daerah, maka semakin besar pula ketergantungannya pada sumber luar, yang berakibat pada berkurangnya independensi keuangan dan berdampak buruk pada kinerja keuangannya. Bagi kreditur pemerintah daerah dan calon kreditur yang menawarkan alternatif kredit di sektor publik, rasio utang atau *leverage* sangatlah penting (Alfi & Sari, 2023).

g) Jumlah Penduduk

Salah satu faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah lokal adalah jumlah masyarakat (Alfi & Sari, 2023). Seiring bertambahnya jumlah masyarakat, kebutuhan akan pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi umum, dan kemampuan memanfaatkan sumber daya alam yang sudah tersedia semakin besar. Pasal 26 ayat 2 UUD 1945 mendefinisikan “penduduk” sebagai warga negara asing dan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

Chairany (2010) mendefinisikan penduduk sebagai individu yang telah berada di wilayah geografis suatu negara selama enam bulan atau lebih, serta mereka yang telah tinggal kurang dari enam bulan namun berniat untuk tetap tinggal. Marseno & Mulyani (2020) menegaskan bahwa pengumpulan data kependudukan dapat dilakukan dengan tiga cara:

1. Sensus, yaitu pendataan kependudukan secara menyeluruh.
2. Survei, yaitu pengumpulan data populasi sampel.
3. Sistem Registrasi Kependudukan, yaitu pengumpulan data kependudukan yang diperoleh dari catatan resmi yang dikelola oleh lembaga yang berwenang, misalnya kecamatan. Sensus penduduk di Indonesia dilakukan setiap satu dekade sekali, sehingga angka penduduk tahunan diperoleh dari perhitungan proyeksi penduduk. Aksesibilitas data demografi yang tepat sangat penting dalam mencapai hal ini.

Masyarakat akan merasa tidak puas dan ragu membayar pajak jika jumlah masyarakat yang besar tidak didukung oleh pelayanan publik dan kebijakan yang memadai. Potensi pendapatan lokal akan menurun apabila tidak dikelola dengan baik. Seiring bertambahnya jumlah masyarakat, basis pajak dan retribusi daerah pun semakin besar, sehingga meningkatkan pendapatan lokal dan meningkatkan kinerja keuangan penyelenggaraan pelayanan publik (Alfi & Sari, 2023).

h) Umur Pemerintah Daerah

Alfi & Sari (2023) menyatakan bahwa umur suatu pemerintahan daerah yang ditentukan dengan menghitung jangka waktu antara tahun pengesahan dan tahun penilaian, mencerminkan sudah berapa lama berdiri atau disahkan sebagai pemerintah kabupaten atau kota. Menurut UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat 20, pembentukan suatu daerah berarti menentukan watak daerahnya pada suatu wilayah tertentu. Dibandingkan tahun sebelumnya, usia pemerintahan daerah berkorelasi dengan kematangan dan perkembangan proses pengelolaan daerah otonom. Daerah yang mempunyai umur panjang sering kali memiliki hasil keuangan yang kuat.

Djuniar et al. (2021), pemerintah lokal yang sudah lama lebih efektif karena keahlian dan keterampilan pelaporan keuangan mereka, serta kredibilitas, reputasi, dan kinerja mereka yang kuat, sehingga menurunkan kemungkinan penundaan pelaporan. Selanjutnya, pemerintah daerah akan menjadikan laporan ini sebagai pedoman dalam melaksanakan daerah

otonomnya. Karena seluruh transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dan disajikan secara menyeluruh, transparan, dan tepat waktu, memungkinkan perbandingan dan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, meningkatkan penyajian laporan keuangan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah (Yuliani, 2017).

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Telaah Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	Putri & Yuniarta (2023)	Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Belanja Modal	PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.
2	Alfi & Sari (2023)	Leverage Jumlah Penduduk Umur Pemerintah Daerah	Leverage berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.
3	Maulina et al (2021)	Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Belanja Modal	PAD dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
4	Padang & Padang (2023)	Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan	PAD dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Belanja modal berpengaruh

Tabel 2.1
Telaah Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
5	Novita & Arza (2024)	Belanja Modal Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Belanja Modal	negatif terhadap kinerja keuangan daerah PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.
6	Mahadewi & Indraswarawati (2023)	Ukuran Pemerintah Daerah Belanja Modal Dana Perimbangan Pendapatan Asli Daerah	Ukuran pemerintah daerah dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Belanja modal dan PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.
7	Djuniar et al (2021)	Umur Pemerintah Daerah Tingkat ketergantungan pada pemerintah Kemakmuran Belanja Modal Hasil pemeriksaan audit BPK	Umur pemerintah dan tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Kemakmuran, belanja modal, dan hasil pemeriksaan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.
8	Siregar (2020)	PAD Ukuran Daerah Leverage Dana Perimbangan	PAD dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ukuran daerah dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
9	Natoen et al. (2019)	<i>Population</i> Ukuan Daerah Tingkat Kemakmuran <i>Intergovernmental revenue</i>	<i>Population</i> berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Ukuran daerah dan tingkat kemakmuran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

Tabel 2.1
Telaah Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
10	(Nauw & Riharjo Ikhsan Budi, 2021)	PAD Dana perimbangan Belanja modal	<p><i>Intergovernmental revenue</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>PAD memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>

Sumber: Beberapa artikel yang diolah, 2024

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan.

Pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah lokal sendiri, tanpa bantuan pihak luar, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Peningkatan pendapatan PAD menunjukkan tingkat kemandirian dan efektivitas pemerintah daerah dalam mengawasi aliran pendapatan (Putri & Yuniarta, 2023).

Teori sinyal (Ross, 1977), yang mendasari penelitian ini, berpendapat bahwa pendapatan daerah berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah lokal. Ketika pemerintah lokal mampu mendanai kegiatan mereka sendiri tanpa bergantung pada pembayaran transfer dari pemerintah pusat atau organisasi regional lainnya, maka kinerja keuangan dianggap memadai.

Penelitian Putri & Yuniarta (2023) dan Maulina et al. (2021) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah lokal, sedangkan penelitian Mahadewi & Indraswarawati (2023) menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah lokal. Pendapatan lokal yang besar akan menggambarkan otonomi pemerintah daerah dalam membiayai inisiatif kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah

H1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan.

Dana yang diberikan pemerintah pusat yang dikenal sebagai "dana perimbangan" (kadang-kadang dikenal sebagai "dana transfer") dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan regional dan memberikan dukungan selama pandemi dan bencana alam. Pemerintah lokal sangat bergantung pada pemerintah pusat dan tidak mencari sumber pendapatan lain jika menerima dana transfer dalam jumlah berlebihan (Putri & Yuniarta, 2023).

Menurut teori sinyal (Ross, 1977), dana transfer merupakan salah satu penentu kinerja keuangan pemerintah lokal. Kinerja keuangan dikatakan memuaskan apabila porsi dana transfer tidak melebihi pendapatan lokal yang dialokasikan untuk kegiatan pembiayaan. Kebutuhan akan dana transfer menunjukkan bahwa pemerintah daerah kurang dalam menangani aliran pendapatan saat ini.

Penelitian Putri & Yuniarta (2023) dan Novita & Arza (2024) menunjukkan bahwa dana transfer berdampak buruk terhadap kinerja keuangan pemerintah lokal, sedangkan Padang & Padang (2023) menunjukkan bahwa dana transfer berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah lokal. Dana transfer membuat pemerintah lokal menjadi sangat bergantung, sehingga pada akhirnya menghambat pembangunan dan mengganggu kinerja keuangannya.

H2. Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan.

3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan.

Belanja modal mengacu pada dana yang dialokasikan untuk perolehan atau pemeliharaan aset yang memberikan keuntungan jangka panjang. Alokasi pendanaan APBD untuk belanja modal mencerminkan keutamaan pemerintah lokal dalam mengembangkan atau memperoleh aset daerah (Putri & Yuniarta, 2023).

Menurut teori sinyal (Ross, 1977), pengeluaran untuk penanaman modal mencerminkan prioritas pemerintah lokal dalam pengalokasian APBD. Alokasi pendanaan yang terbatas dan tidak dikelola dengan baik membatasi pemerintah lokal pada proyek-proyek yang tidak optimal, sehingga menyebabkan lambannya pembangunan daerah.

Penelitian Padang & Padang (2023) dan Novita & Arza (2024) menunjukkan bahwa belanja modal berdampak buruk terhadap kinerja keuangan pemerintah lokal. Selain itu, Maulina et al. (2021) menegaskan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah

lokal. Dana belanja modal yang besar tidak menjamin peningkatan kinerja keuangan, terutama jika dana tersebut tidak dikelola dengan baik, terutama jika dana yang dialokasikan sangat sedikit.

H3. Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan
4. Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan.

Leverage mewakili pilihan sumber pendanaan yang tersedia bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas mereka. Namun demikian, pemerintah daerah dengan *leverage* yang besar mengurangi kepercayaan terhadap calon investor dan lembaga keuangan yang ingin memberikan kredit (Alfi & Sari, 2023).

Menurut teori sinyal (Ross, 1977), *leverage* merupakan faktor penentu kinerja keuangan pemerintah daerah. *Leverage* dapat menjadi sumber keuangan alternatif bagi pemerintah lokal jika ditangani secara efektif. Meskipun demikian, pemerintah lokal dengan tingkat utang yang besar juga menunjukkan kurangnya kompetensi dalam mengelola pendapatan dan kewajiban mereka.

Penelitian Alfi & Sari (2023), menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah lokal, sedangkan Siregar (2020) menyatakan bahwa *leverage* menurunkan kinerja keuangan pemerintah lokal. Pemerintah lokal yang pengelolaan utangnya tidak memadai akan mengalami penurunan kinerja keuangan.

H4. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan.
5. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kinerja Keuangan.

Penduduk adalah individu yang mendiami atau bekerja pada suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu lebih dari enam bulan (Chairany, 2010).

Besarnya jumlah penduduk usia produktif menunjukkan potensi ekonomi yang besar, karena mereka merupakan sumber daya manusia yang mampu memberikan kontribusi langsung terhadap kegiatan perekonomian daerah. Penduduk usia kerja akan bekerja, menghasilkan barang dan jasa, serta memberikan kontribusi pada pajak daerah atau retribusi daerah, yang selanjutnya dialokasikan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan penduduk usia produktif tidak hanya meningkatkan dinamika pasar tenaga kerja tetapi juga berkontribusi terhadap pendapatan daerah, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut teori sinyal (Ross, 1977), populasi berfungsi sebagai ukuran kinerja keuangan. Besarnya jumlah penduduk usia kerja menandakan meningkatnya kebutuhan terhadap pelayanan publik dan peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah daerah mungkin menawarkan program pelatihan bagi penduduk yang mencari pekerjaan untuk mengurangi tingkat pengangguran saat ini.

Penelitian Alfi & Sari (2023), menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah lokal. Di daerah-daerah dengan jumlah penduduk usia kerja yang besar, tingkat pendapatan akan meningkat sehingga meningkatkan kinerja keuangan pemerintah lokal.

H5. Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

6. Pengaruh Umur Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan.

Usia Pemerintahan Daerah mengacu pada jangka waktu sejak dilantik (Alfi & Sari, 2023). Usia pemerintah daerah seringkali dikaitkan dengan

akumulasi pengalaman mereka dalam pelaporan keuangan, perumusan kebijakan, dan penyampaian layanan publik. Pengalaman ini akan meningkatkan kapasitas manajerial sehingga meningkatkan kredibilitas pemerintah lokal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pengelolaan keuangan daerah..

Penelitian ini didasarkan pada teori sinyal (Ross, 1977), gagasan ini berpendapat bahwa usia pemerintah daerah mencerminkan kemanjurannya dalam mengendalikan APBD. Pemerintah daerah dengan jangka waktu yang cukup lama mempunyai pengalaman dan kerangka administrasi yang mapan. Namun demikian, pengetahuan yang luas tidak menjamin kualitas yang diberikan; misalnya, sistem administrasi kuno yang gagal beradaptasi dengan kemajuan masa kini menimbulkan permasalahan yang signifikan.

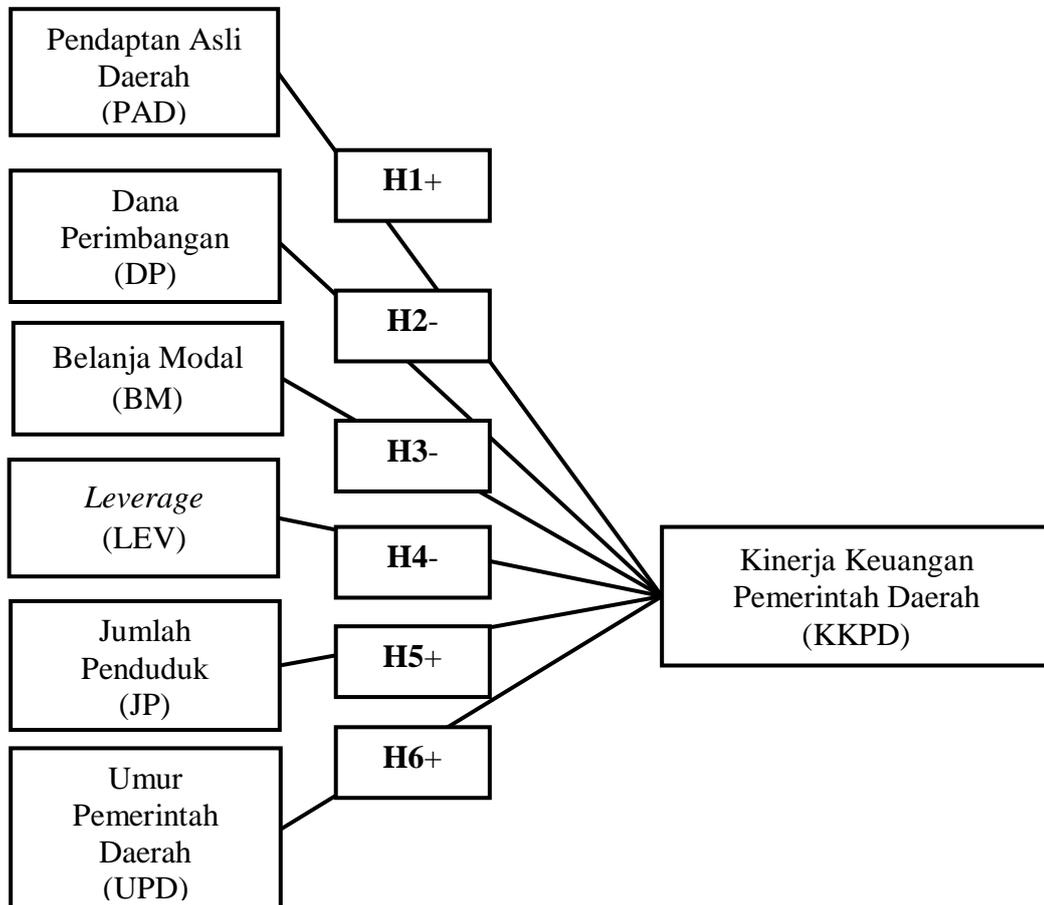
Penelitian Alfi & Sari (2023) menyatakan bahwa usia pemerintah lokal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangannya, sedangkan Khasanah & Rahardjo (2014) menunjukkan bahwa usia pemerintah lokal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangannya. Pemerintahan daerah yang sudah mapan tidak menjamin kinerja keuangan yang unggul; sebaliknya, keahlian mereka berkontribusi pada peningkatan hasil keuangan.

H6. Umur Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

D. Model Penelitian

Gambar 1.2 menunjukkan kerangka pemikiran yang dibuat dalam model penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan,

belanja modal, *leverage*, jumlah penduduk, dan umur pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan daerah.



Gambar 1. 2
Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa populasi adalah area generalisasi yang mencakup objek dan subjek yang memiliki kualitas dan atribut tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah..

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2017), baik jumlah populasi maupun karakteristiknya terdiri dari sampel. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel *purposive sampling*, yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kriteria sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Mempublikasi laporan keuangan daerah selama 2018-2022.
- b) Memilih pemda dalam karesidenan Semarang karena memiliki daerah dengan rata-rata realisasi pendapatan asli daerah tertinggi.
- c) Memilih pemda dalam karesidenan Pekalongan karena memiliki daerah dengan rata-rata realisasi pendapatan asli daerah terendah.
- d) Mengeliminasi daerah dengan pendapatan asli daerah menengah

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, teknik pengumpulan data menggunakan instrument penelitian analisis data statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan (Sugiyono, 2017). Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2018-2022 yang diperoleh melalui website jateng.bpk.go.id, sedangkan jumlah penduduk diambil dari website jateng.bps.go.id dan umur pemerintah daerah diambil dari website masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan sumber data yang diperoleh dengan memanfaatkan berbagai literatur seperti buku, jurnal, skripsi, dan sumber lain yang masih terkait dengan penelitian.

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tabel 3. 1
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Capaian pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan pengeluarn APBD dalam satu periode. (Padang & Padang, 2023)	Rasio Derajat Desentraliasi Fiskal $\frac{PAD}{TPD} \times 100$	Rasio
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan yang diperoleh suatu daerah dengan memanfaatkan sumber-sumber penghasilan yang ada didaerah tersebut. Sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padang & Padang (2023)	Rasio Kemandirian $\frac{PAD}{DP + LEV} \times 100\%$ Mahmudi (2016)	Rasio
Dana Perimbangan	Dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan keuangan dan pembangunan agar tidak tetinggal dari daerah lain. Nauw & Budi (2021)	Rasio Ketergantungan $\frac{TDP}{TPD} \times 100\%$ Mahmudi (2016)	Rasio
Belanja Modal	Pengeluaran yang dialokasikan untuk membeli aset dengan harapan aset tersebut membawa keuntungan jangka panjang bagi pemerintah daerah Nauw & Budi (2021)	Rasio belanja modal $\frac{TBM}{APBD} \times 100\%$ Mahmudi (2016)	Rasio
<i>Leverage</i>	<i>Leverage</i> digunakan untuk alokasi kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Alfi & Sari (2023)	$\frac{DER}{\frac{Total\ Hutang}{Total\ Ekuitas}} \times 100\%$ Alfi & Sari (2023)	Rasio
Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk yang bekerja akan mempengaruhi pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Alfi & Sari (2023)	<i>Dependency Ratio</i> $\frac{P\ usia\ non\ produktif}{P\ usia\ produktif} \times 100\%$ Alfi & Sari (2023)	Rasio
Umur Pemerintah Daerah	Umur pemerintah daerah yang semakin tua menandakan pemahaman atau pengalaman yang dimiliki lebih banyak sehingga	Umur Pemerintah Daerah = LN (Umur	Nominal

Tabel 3. 1
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
	kinerja keuangan akan semakin baik. Alfi & Sari (2023)	Pemerintah Daerah) Alfi & Sari (2023)	

Sumber: Beberapa artikel yang diolah, 2024

D. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menurut Ghozali (2018) adalah statistik yang digunakan untuk mengkaji data dengan mengkarakterisasi data yang dikumpulkan sebagaimana adanya, tanpa berusaha menarik kesimpulan atau generalisasi yang diketahui secara luas. Tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, modus mean median, desil, persentil, sebaran data dengan menghitung rata-rata dan deviasi standar, serta persentase merupakan contoh bagaimana data ditampilkan dalam statistik deskriptif. Akibatnya, secara teknis tidak ada uji signifikansi atau tingkat kesalahan dalam statistik deskriptif karena peneliti tidak bermaksud untuk melakukan generalisasi.

2. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah variabel bebas dan terikat dalam suatu model regresi berdistribusi normal atau tidak normal digunakan uji normalitas. Analisis statistik yaitu uji statistik non parametrik Kolmogrow-Smirnov (K-S) digunakan untuk melakukan uji normalitas. Jika nilai signifikansi $> 0,5$ (lebih besar dari 0,5), maka uji statistik Kolmogrow-

Smirnov (1 sampel K-S) dianggap normal; jika nilai signifikansi $< 0,5$ (kurang dari 0,5), maka data dianggap berdistribusi tidak normal.

b) Uji Multikolinieritas

Mencari korelasi antar variabel independen dalam regresi merupakan tujuan dari Uji Multikolinearitas. Tidak boleh ada korelasi antar variabel independen dalam model regresi yang layak. Besarnya nilai toleransi dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) dapat digunakan untuk menentukan ada tidaknya multikolinearitas pada model regresi. Jika nilai VIF kurang dari 10,00 dan nilai toleransi lebih besar dari 10 persen (0,10), maka regresi bebas dari permasalahan multikolinearitas (Ghozali, 2018).

c) Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah residu suatu pengamatan berbeda variannya dengan pengamatan lain dalam model regresi. Disebut homoskedastisitas apabila varians residu dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya tetap, dan disebut heteroskedastisitas jika bervariasi. Model regresi yang bersifat homoskedastis atau tidak terdapat heteroskedastisitas dianggap berkualitas tinggi (Ghozali, 2018).

d) Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ berkorelasi dalam model regresi linier. Tidak terdapat autokorelasi pada model regresi yang baik ini. Dalam regresi linier, autokorelasi berpotensi

mengganggu model, sehingga menghasilkan hasil yang bias. Uji Durbin Watson (DW-Test) adalah salah satu dari berbagai teknik yang digunakan untuk menentukan apakah ada autokorelasi.

Nilai DW hitung (d) dan nilai DW tabel (dL dan dU) akan diperoleh dengan uji Durbin Watson (uji DW). Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi 5% dapat diterapkan. Menurut Ghozali (2018), uji Durbin Watson (DW-Test) dengan kriteria pada tabel 3.2 dapat digunakan untuk memastikan apakah terdapat masalah autokorelasi.

Tabel 3. 2
Panduan Pengambilan Keputusan DW Test

Ketentuan	Keputusan	Penolakan
$d < dL$ atau $d > 4-dL$	Tolak H_0	Terjadi autokorelasi
$dL \leq d \leq 4-dU$ $\leq d \leq 4-dL$	Tidak ada keputusan	Tidak dapat disimpulkan
$dL < d < 4-dU$	Gagal tolak H_0	Tidak terjadi autokorelasi

E. Pengujian Hipotesis

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini dengan program SPSS. Karena analisis regresi digunakan untuk menggambarkan arah hubungan antara variabel-variabel ini dan untuk mengetahui dampak variabel independen terhadap variabel dependen, maka digunakan analisis berganda (Ghozali, 2018). Koefisien untuk setiap variabel independen mewakili temuan analisis regresi. PAD, dana perimbangan, belanja modal, leverage, jumlah penduduk, dan umur pemerintahan merupakan variabel independen yang dipertimbangkan dalam

penelitian ini. Kinerja keuangan pemerintah daerah dijadikan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini.

Model regresi berganda yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

$$\text{KKPD} = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DP} + \beta_3 \text{BM} + \beta_4 \text{LEV} + \beta_5 \text{JP} + \beta_6 \text{UPD} + e$$

Keterangan:

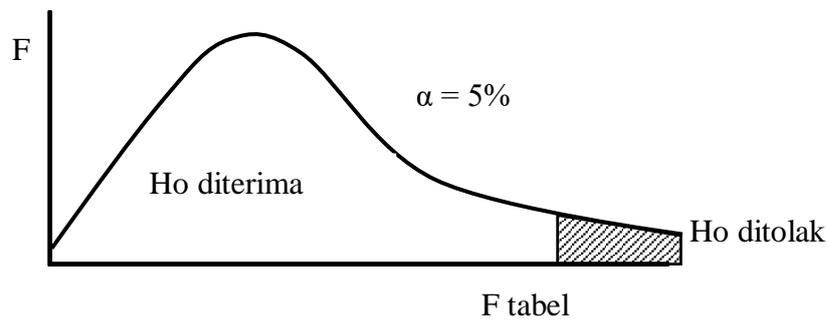
KKPD = Kinerja Keuangan Pemerintah daerah
 PAD = Pendapatan Asli Daerah
 DP = Dana Perimbangan
 BM = Belanja Modal
 LEV = *Leverage*
 JP = Jumlah Penduduk
 UPD = Umur Pemerintah Daerah
 B = Koefisien Regresi Berganda
 α = Konstanta
 e = *error*

2. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Sejauh mana model dapat memperhitungkan perubahan variabel dependen diukur dengan koefisien determinasi (Ghozali, 2018). Kisaran nilai koefisien determinasi adalah 0 sampai 1. Karena secara praktis semua variabel dapat menjelaskan variasi variabel dependen, maka model regresi dengan nilai koefisien determinasi mendekati 1 dianggap baik.

3. Uji F (*goodness of fit test*)

Keakuratan fungsi regresi sampel dalam memperkirakan nilai sebenarnya (*goodness of fit*) dievaluasi menggunakan uji F. Uji F ini akan menentukan apakah model yang digunakan sudah fit atau variabel independen cukup mampu menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2018).



Dengan derajat kebebasan pada pembilang (df) = k dan derajat pada penyebut (df) = $n-k-1$, dimana k adalah banyaknya variabel bebas, maka kriteria penilaian hasil hipotesis Uji F berbentuk tingkat signifikansi 5%.

Pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria :

- a) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $P\ value < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya model yang digunakan bagus (*fit*).
- b) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau $P\ value > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a tidak diterima, artinya model yang digunakan tidak bagus atau (tidak *fit*).

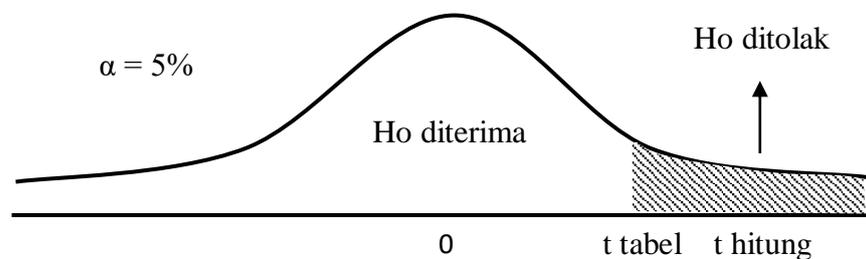
Gambar 3. 1
Uji F

4. Uji t (t-test)

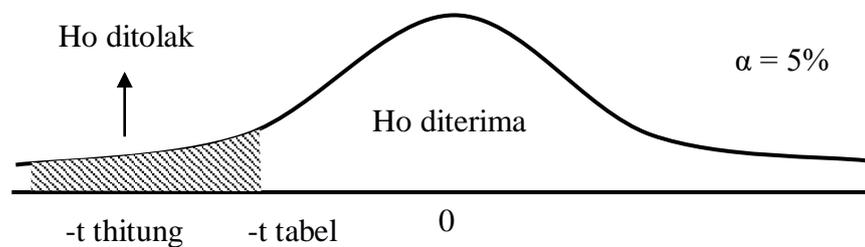
Pada intinya uji t menggambarkan sejauh mana kontribusi masing-masing variabel independen dalam menjelaskan fluktuasi variabel dependen (Ghozali, 2018a). Signifikansi pengaruh pengambilan keputusan diukur dengan uji t yaitu uji satu sisi (*one tailed test*) yang membandingkan nilai t hitung setiap koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) berdasarkan taraf signifikansi yang digunakan pada $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan $df = n -$

Adapun kriteria uji t yaitu:

- a) Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, atau $p \text{ value} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak, dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, atau $p \text{ value} < \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima, dan H_a ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.



Gambar 3. 2
Penerimaan hipotesis positif uji t



Gambar 3. 3
Penerimaan hipotesis negatif uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini akan diuji pengaruh pendapatan pemerintah daerah, belanja modal, dana perimbangan, *leverage*, jumlah penduduk, dan umur terhadap kinerja keuangan. *Purposive sampling* digunakan dalam proses pengumpulan sampel, dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah diikutsertakan.

Variabel independen penelitian ini dapat menjelaskan sebagian besar variasi kinerja keuangan pemerintah daerah, berdasarkan temuan uji koefisien determinasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam model penelitian ini menyumbang sisanya, variabel pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal (BM), dana perimbangan (DP), *leverage* (LEV), jumlah penduduk (JP), dan umur pemerintah daerah (UPD) secara kolektif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja keuangan.

Faktor pendapatan asli daerah dan umur pemerintah daerah terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan berdasarkan hasil uji t. Artinya, kinerja keuangan suatu pemerintah lokal akan meningkat seiring dengan besarnya pendapatan daerah yang dimilikinya. Demikian pula, kinerja keuangan pemerintah lokal mungkin akan lebih stabil seiring dengan berjalannya waktu.

Namun kinerja keuangan dipengaruhi secara negatif oleh variabel dana perimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mungkin kurang termotivasi untuk menangani anggaran daerah secara lebih mandiri dan efektif jika mereka bergantung pada uang perimbangan pusat. Karena cenderung kurang meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan lebih mengandalkan pendanaan dari pemerintah pusat, daerah yang terlalu bergantung pada dana perimbangan justru mempersulit peningkatan kinerja keuangannya.

Selain itu, kinerja keuangan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel jumlah penduduk, *leverage*, atau belanja modal. Karena anggaran lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai dibandingkan untuk pembangunan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah, maka rendahnya alokasi belanja modal menurunkan efektivitas kinerja keuangan. Meskipun penting dalam konteks pendanaan, *leverage* tidak banyak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Demikian pula, meskipun penduduknya mempunyai potensi ekonomi, namun pendapatan yang diperoleh akan tetap rendah jika rata-rata pekerjaan yang dimiliki tidak mendukung pemerintah daerah.

Daerah lain yang sudah mandiri secara finansial dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Untuk mengurangi ketergantungan mereka pada dana perimbangan, mereka juga dapat mencari sumber dana tambahan untuk membantu mendanai kegiatan yang perlu dilakukan. Pemerintah daerah akan memperoleh keuntungan besar dari dana perimbangan jika dikelola dengan baik.

B. Keterbatasan

1. Temuan penelitian dapat terdistorsi oleh pengambilan sampel yang hanya menggunakan kriteria tertinggi dan terendah jika sampel yang dipilih tidak cukup mewakili kelompok.
2. Karena sampel yang dipilih hanya mencakup wilayah dengan nilai terendah dan terbesar, maka teknik pengambilan sampelnya terlalu luas. Akibatnya, lokasi dengan karakteristik antara yang mungkin memiliki kondisi keuangan dan pengelolaan yang berbeda tidak akan terwakili secara memadai. Oleh karena itu, pemilihan sampel yang lebih representatif dan beragam akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh variabel-variabel yang diteliti terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan.
3. Pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pola jangka panjang dan variasi kinerja keuangan pemerintah lokal mungkin terbatas pada jangka waktu 5 tahun studi ini. Jangka waktu yang lebih singkat dapat menyulitkan untuk melihat tren yang lebih besar atau perubahan penting dalam pengelolaan keuangan yang mungkin terjadi seiring berjalannya waktu.

C. Saran

1. Variabel independen seperti luas wilayah dapat ditambahkan pada penelitian selanjutnya (Siiregar, 2020). Misalnya saja, pengelolaan infrastruktur dan keuangan mungkin lebih sulit dilakukan di wilayah yang lebih luas dibandingkan wilayah yang lebih kecil, sehingga hal ini dapat berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian,

kemampuan dan efektivitas pengelolaan sumber daya pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh ukuran daerah

2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperluas mencakup provinsi atau wilayah lain di Indonesia selain Provinsi Jawa Tengah. Dengan meningkatkan jumlah sampel, penelitian ini akan mampu mengumpulkan data yang lebih luas dan mengevaluasi kinerja keuangan di berbagai lokasi dengan berbagai variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam banyak konteks daerah.
3. Karena jangka waktu yang lebih panjang memungkinkan identifikasi tren jangka panjang, perubahan pola, atau pengaruh kebijakan yang lebih jelas terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, jangka waktu tambahan tersebut bisa lebih lama dari lima tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, M. R., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Leverage, Jumlah Penduduk dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2020. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1098–1114. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.750>
- Bagus Fahreza, M., Sadtyo Nugroho, W., & Hakim Purwantini, A. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 1–22. <https://journal.unimma.ac.id>
- Mahadewi, M. A. M., & Indraswarawati, S. A. P. A. (2023). Pengaruh Ukuran Pemerintah Dearah, Belanja Modal, Dana Perimbangan, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Di Provinsi Bali. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 107–116. <https://doi.org/10.32795/hak.v4i2.4031>
- Natoen, A., Febriyanti, A., Sarikadarwati, & Ardiani, S. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2013-2017). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(2), 106–117.
- Nauw, E. T., & Riharjo Ikhsan Budi. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol. 10 No.
- Ni Putu Ayu Septiyani Putri, & Gede Adi Yuniarta. (2023). Pengaruh Pendapatan Asil Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(01), 133–147. <https://doi.org/10.23887/jap.v14i01.62916>
- Novita, R., & Arza, F. I. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2021. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(1), 430–443. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1367>
- Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *JRAK*, 9(2), 303–318. www.djpk.depkeu.go.id

- Priyono, N., Nugroho, W. S., Fatimah, A. N., & Wira, R. (2021). Analisis Perbandingan Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Model Fiscal Trend Monitoring System (FTMS) Pada Kabupaten Magelang Dan Kota Magelang. *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 97–110.
- Siregar, M. I. C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Papua. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 26–42. <https://doi.org/10.51263/jameb.v5i1.111>
- Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 24(1), 1–14.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 15.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 137.
- Badan Pusat Statistik, (2024). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, 2018-2020*. Diakses 2024
- Badan Pusat Statistik, (2024). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, 2021-2022*. Diakses 2024
- Ghozali, I. (2018a). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018b). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi ke-9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.373>.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- William C. Rivenbark, Dale J. Roenigk, Gregory S. Allison. (2010). Conceptualizing Financial Condition In Local Government. *Journal of Public*

- Budgeting, Accounting & Financial Management, 22(2), 49-177.
<https://doi.org/10.1108/JPBAFM-22-02-2010-B001>.
- Ross, Stephen A. "The Determination of Financial Structure: The Incentive-Signalling Approach." *The Bell Journal of Economics*, vol. 8, no. 1, Spring 1977, pp. 23-40.
- Sari, I. P., Agusti, R., & Rofika. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/kotaPulau Sumatra). *JOMFekon*, 3(1).
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. STIM YKPN. Jakarta.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2014). Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154-170.
- Chairany, M. (2010). Analisis Total Penduduk Kecamatan Padang Bolak Pada Tahun 2012. (Tugas Akhir). Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Halim, Abdul. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ke-Empat. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul., & Iqbal, M. (2012). Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi 3. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.